



► KIPRAH UPT P2TP2A

## Perempuan Itu Misterius



Harian Jogja/Uli Febriarni

**Polana Setia** Hati bersama sejumlah pengelola UPT P2TP2A, belum lama ini.

Kota Jogja telah memiliki Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A). Setiap perempuan, anak, laki-laki yang mengalami kekerasan bisa menumpahkan keluh-kesahnya. Seperti apa dinamika di sana? Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Uli Febriarni.

Sebuah gedung yang berada di Jalan Batikan, Umbulharjo, Jogja, tampak seperti taman kanak-kanak. Di halaman gedung, penuh warna dan dihiasi sejumlah ornamen unik bila dipandang. Seperti contohnya sejumlah ban bekas yang dicat warna-warni, dijadikan pot tanaman bebungaan. Ban-ban bekas itu dipajang sedemikian rupa dengan susunan tertentu di dinding. Penampakan luar bangunan tak mengesankan gedung itu memiliki fungsi vital bagi masyarakat rentan. Sebuah pelang yang dipasang membuat orang yang datang baru tahu jika tempat itu adalah Gedung Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A).

► Halaman 6

### Perempuan Itu...

UPT tersebut tidak berdiri sendiri sebagai sebuah gedung yang hanya melayani satu pelayanan. UPT tersebut dipasang pelang agar dikenal sebagai bangunan sekretariat bersama, diperuntukkan bagi sejumlah kantor pelayanan yang sama-sama peduli dengan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.

Di UPT yang berada dalam ketugasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jogja itu sedang diadakan rembuk antara Satgas Sigerak bersama pengelola UPT. Tak lama, rapat evaluasi selesai. Kepala UPT, Polana Setia Hati, datang menghampiri. Lengkap dengan senyum lebar dan sapaan ramahnya.

Tak banyak berbas-basi, pada akhirnya tersebutlah bahwa, UPT yang baru optimal beroperasi awal 2018 itu, sejauh ini telah menangani sedikitnya 87 kasus kekerasan. Kasus-kasus yang ditangani itu, berdasarkan laporan sejak kurun waktu 2018 hingga awal 2019. Kekerasan terjadi baik pada perempuan, laki-laki dan anak-anak, baik itu secara verbal maupun fisik.

Penanganan bagi korban kekerasan diberikan menyesuaikan *assessment*. Bisa berupa advokasi hukum, bisa juga psikologi. Bahkan ada pula edukasi hingga pendampingan sampai pemulihan trauma. "Kami upayakan mereka pulih secara konteks psikologi. Walau tidak bisa 100 persen ya," kata dia, akhir pekan lalu.

Selain itu, UPT juga membantu korban dalam urusan biaya fasilitas persidangan, apabila kasus sampai maju ke meja hijau. Namun, biaya itu tidak akan diberikan kepada korban begitu saja dalam bentuk nominal, melainkan dibayarkan langsung antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Misalnya, kasus ditangani

oleh Pengadilan Negeri [PN], jadi uang tersebut kami bayarkan langsung ke rekening PN," ujarnya.

Setiap warga Kota Jogja berhak mendapatkan pelayanan dari UPT. Yang pasti mereka warga Kota Jogja yang dibuktikan lewat KTP elektronik yang dimiliki.

Ia tidak memungkiri dalam banyak kasus yang ditangani sejauh ini, perempuan berada dalam daftar tertinggi jumlah korban kekerasan. Terutama kasus KDRT, baik itu secara verbal maupun fisik.

Di masa-masa sekarang ini, perempuan lebih berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya seiring dengan tingginya informasi yang bisa mereka akses. Mereka melapor ketika apa yang mereka alami sudah sangat kritis. "Perempuan itu misterius. Kalau pasangan mereka melakukan kekerasan, yang mereka [perempuan] pikirkan adalah menyelamatkan anak-anak. Mereka melapor ketika sudah berada di tataran sangat tak mampu lagi menahannya," ungkapnya.

Polana menambahkan pendekatan yang diterapkan dalam penanganan kekerasan di UPT P2TP2A adalah penanganan yang berbasis gender. Jadi, bukan hanya perempuan yang dilindungi haknya, melainkan juga laki-laki yang menjadi korban kekerasan.

Kalau disebutkan, kekerasan yang dialami laki-laki bentuknya perundungan. Sedangkan pada laki-laki dewasa, mereka menjadi korban dalam perebutan hak asuh anak, pasca-perceraian.

Polana menjelaskan bekerja di UPT bukan berarti tanpa tantangan. Sampai saat ini, masih perlu ada penyamaan perspektif gender dalam penanganan kasus kekerasan, di tingkat lintas sektoral.

"Perbedaan perspektif membuat aspek yang lebih penting menjadi termostorduakan. Sedangkan yang terkait dengan aspek administratif lebih dipentingkan," ujar Polana.

Menurut dia, di era saat ini bukan lagi saatnya seseorang menyembunyikan kekerasan yang dialami oleh dirinya. Tidak ada yang ideal dalam pelaporan kasus kekerasan, melainkan bersifat kasuistik.

Karena bisa saja kasus kekerasan dan korban kekerasan tertangani lebih dahulu, sebelum dilaporkan. Namun dalam kasus tertentu, Polana tetap berharap seorang korban kekerasan langsung melapor, begitu ia mengalami kekerasan. Laporan bisa ke UPT atau pihak terkait lainnya.

Di zaman dinamis, tinggi mobilitas dan serba canggih seperti sekarang, kekerasan di dalam rumah tangga terjadi lebih disebabkan karena aspek ekonomi. "Mungkin seiring waktu, semoga ke depan kondisi bisa membaik," ucapnya.

Di akhir pembicaraan, Polana memiliki doa, supaya setiap keluarga bisa membangun ketahanan didukung dengan kebijakan pemerintah.

"Agar sebuah keluarga bisa berjalan harmonis, tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah," ungkapnya.

Kepala DP3A Kota Jogja, Edy Muhammad mengungkapkan Pemkot sedang merancang bangun layanan *hotline*. Layanan ini harapannya bisa membantu masyarakat, agar bisa melapor lebih cepat, sehingga memudahkan dalam penanganan kasus. "Penanganan kekerasan di UPT meliputi psikologi maupun pendampingan hukum. Disesuaikan dengan kasus yang dialami dan kebutuhan penyelesaian yang dibutuhkan," kata dia. (uti@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005